

Ketika Pemekaran Ber

* Dua Polres Dalam satu Kota

Isu pemekaran wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) - singkatan ini sering juga disebut Tak Pernah Selesai), tak hanya memunculkan terjadinya tumpang tindih kebijakan. Selain memanasnya suhu politik, isu pemekaran wilayah di kota Serambi Mekah Sumatera Utara ini juga telah memicu munculnya ketidakpastian dalam upaya penegakan hukum.

KABUPATEN Tapsel adalah ibarat orangtua yang memiliki dua orang anak yang sudah besar. Pada waktunya, Tapsel mengawinkan si sulung, dan memberi bagian wilayah untuk ditinggalinya bersama turunan-nya, yaitu wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sedangkan anak kedua, yang konon agak manja- mendapat bagian wilayah kota Padang Sidempuan.

Seiring dengan waktu, karena keserakahannya, anak kedua (Padang Sidempuan) malah mengusir bapak kandungnya sendiri (Kabupaten Tapsel) keluar dari wilayahnya. Diselimuti kesedihan karena tidak tahu harus mendirikan rumah dimana (ibukota), tiba-tiba malah digerogoti oleh rencana untuk memekarkan Tapsel menjadi tiga kabupaten sekaligus yakni, Kabupaten Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Barumun Raya.

Masalah bertambah runyam. Akibat ulah anak kedua (Padang Sidempuan), Kabupaten Tapsel (induk) kini belum mampu membangun rumahnya sendiri. Roda pemerintahan bahkan nyaris tak berjalan mulus karena produk kebijakan pun terancam pincang akibat isu pemekaran wilayah yang kini menjadi *trend* di berbagai daerah.

Kabupaten Tapsel memiliki luas wilayah sekitar ± 1,65 juta hektar atau hampir seperlima wilayah propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan UU

No. 12/98, kabupaten yang beribukota Padang Sidempuan itu dimekarkan menjadi dua wilayah, yakni Kabupaten Tapsel dan Kabupaten Madina dengan luas ± 635 ribu hektar.

Kemudian berdasarkan UU No. 4/2001, kabupaten yang dikenal sebagai daerah penghasil salak tersebut dibentuk menjadi Kota Padang Sidempuan dengan luas wilayah ± 15 ribu hektar. Akibatnya, Tapsel sebagai kabupaten induk yang memiliki sisa luas wilayahnya ± 1,2 juta hektar itu mau tidak mau harus hengkang mencari tempat untuk ibukotanya sendiri.

Kendati belum memiliki ibukota sendiri, isu pemekaran tiga kabupaten sekaligus kembali menerpa Kabupaten Tapsel. Tarik-menarik kepentingan antar tokoh masyarakat di masing-masing wilayah pun tak terhindarkan. Mereka meminta agar Tapsel dicituk kembali menjadi kabupaten Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Barumun Raya.

Pemekaran boleh-boleh saja karena sudah jelas diatur sesuai UU Otonomi Daerah.

Namun tidak demikian halnya dengan penegakan hukum. Sebab, betapapun carut-marutnya kebijakan pemerintah daerah, hukum haruslah ditegakkan. Namun, apa jadinya apabila isu pemekaran ternyata mampu mempengaruhi ketidakpastian hukum?

MASYARAKAT BINGUNG APARAT JUGA BINGUNG

ISU pemekaran wilayah yang hingga kini masih terus berlangsung di Tapsel secara kasat mata



FOTO: EVA HARTINI

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

buah Ketidakpastian



telah menimbulkan keragu-raguan bagi pihak aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian. Bagaimana tidak, di tengah ketidakpastian letak ibukota Tapsel, di kota Padang Sidempuan kini terdapat dua Polres, yakni Polres Tapsel dan Polres Persiapan.

Ironisnya, dengan adanya Polres Persiapan tersebut Polres Tapsel yang kini masih berkedudukan di Padang Sidempuan namun memiliki wilayah hukum se Tapsel itu tidak bisa lagi melakukan penindakan di wilayah Kota Padang Sidempuan.

"Kita nggak ada masalah. Pembagian wilayah itu jelas ada di UU No. 2/2002. Kalau kita temukan melakukan kejahatan, kita serah-

kan ke Polres Kota. Hanya saja, masyarakat di sini kadang-kadang bingung. Saya lapor di sini, kok malah diserahkan ke Polres kota," kata Kapolres Tapsel AKBP Suryanbodo menirukan komentar masyarakat pelapor.

Masyarakat Padang Sidempuan yang sebelumnya terbiasa meminta bantuan hukum ke Polres Tapsel hingga kini masih terdapat masyarakat yang terkadang lebih memilih melapor ke Polres Tapsel. Walau sering dijelaskan, masyarakat umumnya tetap meminta agar masalah mereka ditangani oleh Polres Tapsel.

Sebagian masyarakat bahkan ada yang menolak apabila kasusnya diserahkan ke Polres Kota de-

ngan alasan pelayanan dan penanganan kasus di sana agak lambat. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan terbatasnya sumber daya manusia baik kuantitas dan kualitas personil

"Saya maunya lapor di Polres Tapsel aja pak? Di kota agak lambat. Disini ajalah pak. Tapi kita kan tidak bisa. Solusinya, sambil kita layani, kita juga jelaskan kepada mereka dan kemudian kasusnya kita serahkan ke sana," kata Suryanbodo, kembali menirukan keluhan warga yang kerap memaksa agar kasusnya ditangani Polres Tapsel.

Disamping suhu politik yang kian hari semakin menanas, suasana di Padang Sidempuan juga nyaris setiap hari diwarnai aksi de-

monstrasi akibat rencana pemekaran tiga kabupaten dan penentuan terhadap ibukota Tapsel yang kini masih terjadi tarik-menarik kepentingan tersebut.

Kendati demikian, demonstrasi (unjuk rasa) baik yang dilakukan oleh yang pro pemekaran atau kontra pemekaran tetap mendapatkan pelayanan yang baik dari Polres Tapsel dengan pengawasan sampai tempat tujuan /sasaran unjuk rasa, dan penjagaan serta pengamanan terhadap pengunjuk rasa maupun sasarannya. Yang diharapkan tidak terjadi tindak pidana (anarkis)

TAPSEL TAK MEMPERSOALKAN

Pemerintah Kabupaten Tapsel, khususnya Polres sendiri tidak mempersoalkan keberadaan ibukota Tapsel. Pemerintah daerah hanya menghendaki bagaimana supaya praktis sehingga tidak menimbulkan ketimpangan kebijakan dan rasa keragu-raguan dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum.

"Pemerintah daerah sendiri nggak ada masalah. Apalagi kita Polisi, tentu tidak mau terlibat dalam masalah politik pemekaran. Pemerintah Daerah hanya menghendaki supaya memilih yang praktis saja. Artinya begini, kalau ibukota kabupatennya belum dipastikan, tentu berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan," katanya.

Hingga kini Kabupaten Tapsel mempunyai 28 kecamatan. Namun, berkaitan dengan rencana pemekaran tersebut, Tapsel sebagai kabupaten induk yang sedianya memiliki luas wilayah seperlima Sumut itu akan berkurang dan hanya menyisakan tujuh kecamatan yang rata-rata tidak mempunyai sumber daya alam.

Sesuai rencana pemekaran, Kabupaten Angkola Sipirok nantinya akan memiliki 11 kecamatan. Sementara Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 10 kecamatan. Jumlah kecamatan Padang Lawas ini nantinya akan dikurangi lagi berkaitan untuk mencukupi jumlah kecamatan di Kabupaten Barumon Raya.

Fenomena itu belum lagi dika-

itkan dengan UU No.32 yang menyebutkan bahwa Kabupaten induk wajib membantu dan membiayai kabupaten yang sedang melakukan pemekaran selama dua tahun. Tentu sudah terbayangkan, bagaimana mungkin Tapsel sebagai kabupaten induk mampu membiayai tiga kabupaten selama dua tahun.

"Bayangkan saja, hanya tujuh kecamatan, wilayahnya juga tidak mempunyai sumber daya alam yang bagus, tetapi kita harus membiayai dua kabupaten yang sedang dalam pemekaran tadi. Ironi sekali, tapi itu menurut nuansa politik. Saya kan hanya pendengar. Mau dibilang setuju atau tidak, kan tidak ada masalah, kita hanya menjalankan tugas kepolisian," jelas Suryanbodo lagi.

Perkembangan politik yang dihasi dengan isu pemekaran tiga kabupaten semakin menghambat realisasi penemuan dan kepastian keberadaan ibukota Tapsel. Bahkan, Pemda sendiri hingga kini belum bisa mempersiapkan dan menetapkan pertapakan pembangunan kantor pemerintahan Kabupaten Tapsel, apalagi pertapakan untuk perkantoran instansi lain (untuk Polres, misalnya)

HARGA-HARGA MULAI NAIK

Suasana politik di Tapsel semakin kompleks menyusul terjadinya kenaikan harga, khususnya harga tanah. Begitu ibukota Tapsel diusulkan pindah ke Sibuhuan, harga tanah langsung melonjak tajam. Kenaikan harga itu sudah tentu akan mempengaruhi anggaran belanja tahun 2008 yang kini sedang disusun dan dipersiapkan untuk diajukan.

Begitu ada suara-suara, nanti ibukota Kabupaten Tapsel ada di Sibuhuan, harga sudah naik semua, khususnya harga tanah. Padahal saya telah menyusun rancangan rencana kerja TA. 2008, untuk mengajukan pembangunan Polres. Jangankan realisasi, pertapakan pembangunan kantor pemerintah maupun perumahan-perumahan-nya saja belum jelas, tegas

Suryanbodo.

Fenomena ini pun akhirnya menjadi salah satu bentuk kendala bagi terlaksananya penegakan hukum dan tugas-tugas kepolisian. Belum terealisasinya ibukota kabupaten sehingga membuat suasana di Tapsel tidak ada kepastian. Pemindahan ibukota ke Sibuhuan semakin menambah polemik di tubuh pemerintahan daerah.

Berdasarkan kesepakatan, ibukota Tapsel semula dipastikan akan pindah ke Sibuhuan. Belakangan, perpindahan itu urung dilakukan dengan pertimbangan bagaimana dengan biaya perkantoran, karyawan dan pegawai. Tak pelak, penolakan yang berujung dengan lahirnya beberapa opsi dari Pemkab Tapsel pun muncul.

Kemudian Pemkab kembali menawarkan opsinya agar ibukota Kabupaten Tapsel dipindahkan ke Angkola Sipirok. Kondisi ini semakin memperkeruh keadaan karena Angkola Sipirok tidak bersedia, sebab mereka lebih memilih melakukan pemekaran. Demikian juga opsi yang menawarkan agar ibukota Tapsel pindah ke Padang Lawas ditolak dengan alasan yang serupa.

"Perkembangan informasi yang saya terima, rencana pemindahan itu diserahkan lagi ke pemerintah daerah. Pemkab diminta untuk merumuskan kembali, dimana sebetulnya ibukota kabupaten induk tapsel ini. Mudah-mudahan, rencana ini terealisasi sehingga ada kepastian dimana Polres kita nanti," sebut Suryanbodo.

Pemindahan ibukota Tapsel memang tidak bisa dianggap enteng karena itu akan memakan biaya yang sangat laur biasa. Pada intinya, pemekaran itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat, demokratisasi. Namun, faktanya setelah pemekaran dilakukan justru sebaliknya.

Tujuan pemekaran sangat jauh dari harapan dan belum mencapai tujuan sesuai dengan UU. Bahkan, boleh dikatakan pemekaran wilayah justru pada akhirnya menambah dan memperberat beban pemerintahan pusat. [cil]



Polres Madina Temukan Ladang Ganja 4 Hektar

LAGI, sebuah ladang ganja seluas empat hektar berhasil ditemukan di Pegunungan Tor Sipatihu Desa Huta Bangun, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dalam sebuah operasi yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Madina, Sumatera Utara, Senin (23/4). Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Madina AKBP Rudy Sumardiyo, didampingi Kasat Narkoba IPTU H Pardosi.

Menurut Kapolres Madina AKBP Rudy Sumardiyo, penemuan itu diawali dengan adanya informasi dari warga masyarakat yang segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke lapangan. "Ini bukti bahwa masyarakat sudah mau peduli dengan bahaya narkoba dan saya sangat berterima kasih," kata Rudy.

Selain menemukan ladang ganja setinggi 2 meter, aparat juga berhasil menangkap dua orang lelaki yang sedang bertugas menjaga ladang ganja tersebut, yaitu Kison Nasution (33), warga Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina dan Pangaduan Nasution (22), dari Desa Sirangkap Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina, yang segera diamankan untuk dimintai keterangan selanjutnya.

Selain itu di dalam gubuk dekat lokasi juga ditemukan dua pucuk senjata api rakitan yang terdiri dari satu laras panjang dan satu laras pendek. Diduga senjata itu merupakan senjata yang digunakan oleh kedua tersangka untuk menjaga ladang ganja.

Menceritakan kronologis penemuan, setelah ada informasi, keesokan harinya Rudy segera memerintahkan anggotanya untuk tetap menjaga lokasi adang ganja dan kemudian mengundang instansi terkait yaitu Kesbang Linmas, Dinas Kehutanan dan Sat Pol PP Mandailing Natal serta masyarakat untuk berangkat ke lokasi bersama Anggota Unit Dalmas keesokan harinya.

Untuk memudahkan penyelidikan, di lokasi tersebut dibuat *Police Line*, lalu dilakukan pemotretan, pencabutan, penghitungan batang ganja, kemudian dilakukan pembungkusan, dan selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres Madina. Barang bukti tanaman ganja yang disita terdiri dari 6450 batang, yaitu: 3112 batang berumur 6 bulan, 2014 batang berumur 4 bulan, 1324 batang berumur 2 bulan, dan 6 goni plastik ganja kering.

Atas penemuan tersebut Kapolda Sumatera Utara sangat berterima kasih kepada masyarakat dan instansi terkait yang memberikan bantuan material maupun spritual sehingga Polres Madina berhasil mengungkap kasus tersebut. Khusus bagi personil Satuan Narkoba Polres Madina, Kapolda juga memberikan penghargaan. [eva]

Buku Pintar membantu "Mbekuk" Rampok 1,3 M di Wilayah Polres Tapsel

INI adalah sebuah cerita tentang perburuan hamba hukum Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara untuk mengungkap pelaku perampokan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tapsel. Kriminal dengan kekerasan tersebut terjadi pada Selasa (10/4) siang bolong yang mengejutkan masyarakat kebun Aek Kulim, Kecamatan Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Naas yang menimpa kantor Perkebunan PT. Firs Mujur Plantation & Industri tersebut terjadi sekitar pukul dua siang.

Geritanya, para pelaku dengan menggunakan lima senjata api berupa satu laras panjang dan empat laras pendek, menodong, kemudian meledakkannya, serta menyandera 23 karyawan termasuk kasir. Gaji karyawan senilai Rp. 1.280.000.000,- (+1,3 M) yang seyogyanya akan dibagikan pada karyawan pada siang yang naas tersebut akhirnya raib dibawa kabur rombongan perampok.

Beberapa saat setelah menerima kabar perampokan yang berlangsung dramatis tersebut, Kapolres Tapsel AKBP Drs. Suryanbodo Asmoro didampingi Kasat Reskrim AKP SM. Siregar SH segera mendatangi TKP. Setelah tiba di TKP yang ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 6 jam segera dilakukan olah TKP dan menyebarkan informasi tersebut ke Polres tetangga serta melaporkan ke Kapolda Sumatera Utara. "Dalam olah TKP tergambar modus operandi yang cukup matang, rapi dan terorganisir dengan pimpinan aksi inisial GN," jelas Kapolres Suryanbodo.

GN, kata Suryanbodo, melakukan aksi setelah mendapat order, gambaran situasi dan kondisi dari UCK, suami dari mantan karyawan perusahaan IRP yang dipecat sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian.

Masih dari hasil olah TKP, GN sebagai pemegang mandat kendali operasi kemudian mempola perampokan dengan 10 personil pelaku utama dengan alat transportasi lima unit sepeda motor RX King /Mega Pro, dan untuk masing-masing sepeda motor dibekali satu pucuk senjata api. Dengan pembagian tugas, satu unit pelaku sebagai pembuka jalan, langsung menyandera petugas security di Gardu I, disusul unit dua mengamankan pos komando perkantoran perkebunan, unit tiga dan empat memasuki ruangan kantor / ruangan kasir, sedangkan unit lima bertugas di luar kantor sekaligus memutus jaringan komunikasi (HT) di sasaran.

AKSI PERBURUAN

Dengan berbekal olah TKP pada tanggal 10 malam dan 11 pagi sampai sore bulan April 2007, "Operasi Perburuan Pelaku" pun digelar oleh Polda Sumut dengan melibatkan beberapa tim yaitu Polres Tapsel / Polsek jajaran, Resmob, Dit Reskrim dan Dit Intelkam.

Pasukan pemburu tersebut pun membuka buku pintar catatan para kelompok pelaku curas dengan modus operandi menggunakan senjata api dengan prioritas sasaran perusahaan berskala besar. Dan berkat analisis terarah dan perjalanan panjang hingga memasuki daerah NAD, otorita Batam, Sumsel dan Jambi, titik terang perburuan pun mulai terungkap, yakni pada 26 April 2007 sampai 17 Mei 2007 berhasil menangkap 8 pelaku yakni Hendra, Jhoni, Anto, Tono, Bahar, Hafni, Irpan, dan Bogek. Dari para pelaku berhasil disita satu pucuk senjata api laras panjang organik jenis Mauser yang telah dimodifikasi (laras dan popor dipotong pendek, no sudah tidak ada sehingga seperti rakitan), delapan butir amunisi yang aktif jenis M16, lima unit sepeda motor, uang tunai Rp. 100.490.000, satu unit televisi beserta digitalnya dan satu unit *handphone*. [cil]